**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA**

**TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari / Tanggal : Selasa / 3 Desember 2013

Waktu : 11:00 – 14:00

Tempat : Ruang Serayu – Gedung A.A. Maramis II Lantai 3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Agenda : Pembahasan tentgang kemajuan pelaksanaan EITI Indonesia (Rapat

 dihadiri oleh Ketua Dewan EITI Internasional Ms. Clare Short).

Peserta Rapat:

Pemerintah

1. Deputi Menko Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Inrternasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: diweakili Restog K. Kusuma.
2. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, diwakili: Subagio Efendi; Masybaih.
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diwakili: Irfan Sofi; Sandy Firdaus.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, diwakili: Yulianto.
5. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diwakili: Sendi Zetaturadi; Teguh W.
6. Kepala Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diwakili:
Sujoko; Dewi Ardhiarini.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, diwakili: Januaris.
8. Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalimantgan Timur: diwakili Edward Noviansyah.
9. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia, diwakili: Syahrir AB.
10. PWYP Indonesia, diwakili: Maryati A.
11. IESR/LSM: Yesi Marbun

Sekretariat EITI Indonesia

1. Ketua Sekretariat EITI Indonesia: Emy Perdanahari
2. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
3. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
4. Budi Utomo
5. Staf Sekretariat: Malidu Ahmad

World Bank

1. Advisor on the EITI A: David W. Brown
2. Adam Pantouw, interpreter.

**Rekonsiliator**

1. Myrnie Zachraini

2. Irsah Thayeb

**Risalah Rapat**

Rapat dibuka oleh pemimpin rapat yaitu Ibu Emi Perdanahari (Ketua Sekretariat EITI Indonesia/ Sekretaris Tim Pelaksana EITI Indonesia).

Emi Perdanahari menyampaikan agenda rapat hari ini adalah:

1. Perkembangan pengumpulan laporan;

2. Perbaikan ruang lingkup pelaporan;

3. Perihal alasan perpanjangan jadwal publikasi laporan untuk dikirimkan kepada Dewan EITI;

4. Audiensi dengan Ketua Dewan EITI, Clare Short.

Selanjutnya **Pemimpin Rapat Emy Perdanahari** mempersilakan Ibu Ambarsari memaparkan materi pembahasan.

**Ambarsari**

Ibu Ambarsari memaparkan terlebih dahulu materi pembahasan yaitu mengenai:

1. Perkembangan pengumpulan laporan;

2. Perbaikan ruang lingkup pelaporan;

Materi seceara rinci adalah sebagimana terlampir.

Di ujung pemamarannya Ambarsari mengharapkan masukan apakah untuk signatute bonus (sektor migas), iuran tetap, dan PBB (sektor Minerba) akan dimasukkan dalam yang direkonsiliasi atau tidak dimohon persetujuan.

**Tanya-Jawab dilakukan:**

**Yulianto (Ditjen Migas)**

Menanyakan, tadi disebut ada 3 KKKS yang belum menyampaikan laporan, agar disebutkan nama perusahaannya, mungkin Ditjen Migas bisa membantu mendorongnya. Kemudian terkait signature bonus rata-rata antara US$ 1-US$ 1.5 juta, dan tadi ada 2 perusahaan yang besar (KKKS ENI dan BP) masing-masing membayar signature bonus sebesar US$ 15 juta dan US$ 25 juta, signature bonus itu memang menjadi kewajiban dari perusahaan/yang memenangkan tender wilayah kerja migas. Sedangkan Ditjen Migas ESDM hanya berwenang untuk menagihnya kepada KKKS yang bersangkutan dan menampungnya/mengumpulkannya sementera, dan kemudian menyetorkannya kepada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Apabila signature bonus akan dimasukkan menjadi bagian yang direkonsiliasi, silakan Sekretariat EITI Indonesia/Tim Pelaksana EITI Indonesia menjalin meknisme untuk menginformasikannya kepada perusahaan/KKKS, sehingga mereka mau menerimanya utnuk direkonsiliasi. Nanti juga dibantu oleh Ditjen Migas.

**Ambarsari**

Tiga perusahaan yang belum menyampaikan laporan itu adalah EMP Malacca Strait, Erlangga Riau, dan WMO. Tapi sebetulnya sudah tiggal 2 yang belum karena WMO sudah merupakan satu badan, dan mitra nya yang JOB /PHE telah melaporkan. Tapi selanjutnya mungkin perlu dibantu komunikasi dengan WMO dan JOB/PHE tersebut. Kemudian mengenai komunikasi informasi dengan perusahaan ENI dan BP berjalan lancar, dan mereka welcome dengan rencana rekonsiliasi untuk signature bonus. Jadi bisa dimulai rekonsiliasi untuk perusahaan yang cukup besar ini.

**Sujoko (SKK Migas)**

Untuk yang terkaiat KKKS, SKK Migas akan menginfokan dan mendorong agar KKKS malaporkan. Mari/silakan dimulai sajarekonsiliasi, SKK Migas siap membantu.

**Syahrir AB (API-IMA)**

Mengenai Iuran tetap, dan PBB sektor Minerba itu konsennya IMA, IMA akan mengkomunikasikan dan mendorong anggotanya melaporkan.

**Myrnie Zachraini (KAP GIS/Rekonsiliator)**

Iya, akan secara maksimal diusahakan untuk semua data laporan perusahaan itu bisa dikumpulkan, dan diusulkannnya agar minerba dan IMA perlu membantunya, sehingga perusahaan-perusahaan IUP batubara mau malapor.

**Syahrir AB (API-IMA)**

Untuk KK mineral mungkin akan sulit, karena di mata audit banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki utang yang banyak seperti Kobatin. Untuk PKP2B atau IMA sudah mengirikan surat agar perusahaan memenuhi permintaan untuk menyampaikan laporannya (2010-2011) dan 2012 kepada EITI Indonesia. Dari koalisi masyarakat sipil malah kami mendapat info hanya ada 9 PKP2B yang sudah memenuhi/ melaporkan. Menjawab pertanyaan peserta dijelaskannya bahwa dari sisi pertambangan, anggota kami / perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip ***good mining*** ***practice***. Sehingga dari ribuan IUP anggota IMA hanya sekitar 47 yang mudah melapor dengan baik.

**David W. Brown (Bank Dunia)**

Mitra yang ditagetkan melapor ke operator lebih dari 100 mitra tapi lebih dari 65 yang belum melaporkan. Apakah ada rencana untuk mengoreksi atau itu akan benar-benar terus dimintakan laporan dari mereka, karena mengingat laporan tahun lalu (2009) dari 100 ada sekitar 30 perusahaan yang juga tidak melapor. Agar itu tidak diulang/terulang lagi.

**Ambarsari**

Kemarin (29 Nov. 2013) kami ada Kick-off Meeting dengan rekonsiliator, dan nanti direncanakan aka nada petemuan rekonsiliator dangan SKK Migas, Dijen Migas dan Minerba. Berdasarkan data dari Minerba ESDM sudah didesain demikian. Dari segi Ditjen Anggaran dan PNBP mereka sudah mencatat ada 65 mitra yang belum melapor. Dari ke 65 mitra ini ada yang lengkap dan ada juga yang tidak lengkap alamatnya. Apakah SKK Migas mempunyai data-data mengenai partner dari PSC, termasuk kontak person dan alamat mitra dan sebagainya. Nanti akan dibicarakan dalam pertemuan pertama antara rekonsiliator dan SKK Migas.

**Yulianto (Ditjen Migas)**

Dilapangan banyak terjadi perubahan mitra, wilayah kerja mitra, PPh Badan dan sebagainya. Itulah yang perlu dikumpulkan lagi informasinya termasuk melalui SKK Migas, sehingga data dan informasi mitra dapat diketahui untuk pelaporan ini.

**Sujoko (SKK Migas)**

Kalau hanya list dari mitra-mitra kontraktor, itu ada di SKK migas, tapi tadi karena alasan banyak perubahan, barangkali detailnya mitra ini, bisa kita membantu bersama-sama.

**Maryati (PWYP Indonesia)**

Apa tidak bisa kita buat kesepakatan bersama. Kita fokus pada / untuk pertambangan yang menyumbang Royalti di atas Rp 5 miliar, itu jumlah 15. Jadi apa kita bisa realistis untuk IUP yang 75 unit perusahaan batu bara yang belum melapor itu. Kita persempit, kita konsentrasi pada besaran nilai yang diterika saja, yaitu yang besar dari 15 entitas. Maksudnya nanti mungkin bisa lebih dari 15 entitas saja.

**Emy Perdanahari (Pemimpin Rapat)**

Kita akan rapat lagi pada pertengahan Desember, kita akan lihat perkembangannya dari proses yang masih dilakukan saat ini, sehingga sebelum 25 Desember akan ada keputusan, barangkali menjelang tanggal tersebut ada perkembangan jumlah entitas yang melapor.

**Syahrir AB (API-IMA)**

Karena proses waktu yang cukup sempit bagi rekonsiliator, IMA mengusulkan agar Sekretariat EITI mengirim surat ke Ditjen Minerba agar terus membantu dan mendorong entitas menyampaikan laporannya.

**Emy Perdanahari (Pemimpin Rapat)**

Terdahulu sudah ada surat seperti itu, tapi memang alasan kesibukan sehingga belum maksimal hasilnya. Tapi secara informal akan terus dimintakan agar Ditjen Minerba mendorong entitas.

Selanjutnya **Emy Perdanahari** mempesilakan Ibu Ambarsari melanjutkan pemaparan.

**Ambarsari**

Menyampaikan pemaparannya mengenai:

Perihal alasan perpanjangan jadwal publikasi laporan untuk dikirimkan kepada Dewan EITI.

Ambarsari memaparkannya terlebih dahulu, sebagaimana materi terlampir. Pada ujung pemaparan, disampaikan Ambar bahwa kita mengajukan perpanjangan jadwal waktu publikasi karena kita disamping menyusun laporan kedua (2010-2011), kita juga menyusun laporan ketiga (2012), serta kita juga berusaha keras memperbaiki kualitas laporan.

**Emy Perdanahari (Pemimpin Rapat)**

Dalam surat permohonan perpanjangan jadwal waktu publikasi tersebut kita sampaikan bahwa alasan tidak *compliant* untuk laporan tahun 2009 adalah karena keterlambatan waktu. Kemarin disampaikan kepada Ketua Dewan EITI, karena sudah ada persetujuan perpanjangan waktu, kalau tidak tercapai pada bulan Desember 2013, maka jadikan alasan lagi untuk tidak compliant.

Kemudian dilanjutkan dengan Tanya Jawab.

**Tanya-Jawab dilakukan:**

**Sujoko (SKK Migas)**

Terkait alasan tidak *compliant* apakah secara materialitas nilai kontribusi turut menentukan juga seperti untuk perusahaan migas jumlah nilai berapa yang dinilai. Disamping itu apakah juga soal jumlah entitas yang dilaporkan juga ditentukan dinilai oleh EITI? Sehingga kita ke depan perlu mempertimbangkan kedua hal tersebut?

**Ambarsari**

Terkait materialitas, tentu beda antara sektor migas dan pertambangan. Di sektor pertambangan ada sekitar 10.000 entitas, tapi yang tercatat membayar royalti di atas Rp 5 miliar hanya sekitar 123. Jadi masih ada sekitar 175 entitas yang belum bisa kita jangkau. Jadi materialiatas jangan sampai ke Rp 50 miliar., cukup hanya sampai Rp 25 miliar saja untuk sektor minerba yang direkonsilisi. Untuk sektor migas bisa secara sentral, melalui Ditjen Migas dan SKK Migas sudah dapat dilihat berapa besar kontribusi kontraktor. Untuk sektor migas mungkin tidak perlu materialitas, karena semua data ada di pusat baik Kontraktor maupun mitra. Untuk Mitra sendiri Sekretariat EITI Indonesia tidak punya data yang lengkap, begitu sejak 2009. Kalau dari PNBP tahun 2009 ada terjadi perubahan kepemilikan, sehingga ada sekarang data perubahan nilai yang terjadi yang tidak bisa dilihat dari segi perusahaan . Tapi kalau melihat prosesnya mungkin nanti bisa dijangkau semua melalui operatornya. Kita nanti bersama Rekonsiliator akan berusaha secaara maksimal. Kalau tidak bisa, mungkin nanti berdasarkan data PNBP mungkin perusahaan yang di bawah sekian untuk mitra ini kita buatkan dash board untuk partner dan melihat juga data yang diperoleh Rekonsiliator nanti.

**Yulianto (Ditjen Migas)**

Maksudnya seberapa jauh yang direncanakan / yang ada sekarang bisa dilaksanakan, nanti kita lihat.

**Ronald Tambunan**

Menganalogikan Migas dengan pertambangan. Di pertambangan ada izin Jasa Usaha Pertambangan, di situ lengkap data ada semua mengenai perusahaan usaha jasa pertambangan. Apa di Migas mungkinkah sepeerti itu.

**Yulianto (Ditjen Migas)**

Beda sektor migas dengan pertambangan. Di sektor migas diatur dengan system PSC. Disitu ditentukan kewajiban kontrakor termasuk permodalan dan segala risiko yang harus ditanggungnya serta hak-haknya. Soal partner/mitra-mitra menjadi kewenangan dari Kontraktor yang bersangkutan. Jadi paraktisnya Ditjen Migas dan SKK Migas hanya berurusan dengan Kontraktor, tidak dengan mitra-mitra.

**Maryati (PWYP Indonesia)**

Pertama Masyarakat Sipil begitu khawatir dengan standar baru EITI . Karena Indondesia sekali tidak compliant dalam validasi laporan. Kedua, ingin memastikan bahwa perpanjangan waktu yang kedua ini, ingin diketahui sebenarnya bagaimana kapasitas EITI Indonesia, karena, dari laporan pertama misal masalah pendanaan dengan MDTF, fekonsiliasi dan sebagainya, tapi kemudian bagaimana bisa kita sepakat untuk melaksanakan agenda 2014, action Plan 2014, karena action plan itu sangat penting terkit kredibilitas Indonesia di mata internasional. Jadi ada output yang kita kejar berupa laporan hasil rekonsiliasi dengan data yang reliable tepat waktunya. Jadi kita tidak berulang kali minta perpanjangan waktu, walaupun boleh, tapi ini menyangkut kredibilitas, dimana itu menandakan kita Indonesia di mata luar seperti under performance sekali dalam mencapai EITI.

Kedua, sepakat dengan IMA , bagaimana reaksi pemerintah terutama mengenai Mineral dan Batubara. Kalau migas sudah jelas materialitasnya dan rata-rata entitasnya sudah banyak yang melapor, kira-kira di atas 80% sudah masuk dalam total materialitas. Tapi, Minerba bagaimana? Mungkin Ini terkait dengan keseriusan pemerintah terutama Ditjen Meneral dan Batubara Kementerian ESDM mendorong perusahaan-perusahaan, karena IMA sendiri anggotanya terbatas, dan juga peran Kemenko Perekonomian legal sektor dari EITI. Jadi posisi Indonesia dalam proses ini sangat kitikal di mata internasional. Nah bagaimana kapasitas kita. Apakah kita dengan kapasitas seperti ini akan merevisi lagi sope, merevisi ruang lingkup laporan EITI Indonesia. Mungkin kita bersama-sama nanti akan mengambil kebijakan terkait hal ini. Karena kami melihat pemakaian dana-dana MDTF sendiri ke dalam APBN tidak optimal. Apalagi tahun lalu banyak dana-dana MDTF tidak dibelanjakan dengan baik.

**Emy Perdanahari (Pe mimpin Rapat)**

Ya, memang apa yan g disampaikan oleh Bu Maryati itu istilahnya langsung menusuk jantung. Terutama dukungan sekretariat dan dukungan dari atas. Terutama pada awal, pada waktu pelaporan pertama kita sulit. Kalau dianalisa, memang APBN nya itu harus hati-hati jangan sampai risiko masuk penjara dari petugas, ini memang menjadi alasan yang kuat juga, disamping hal-hal yang dukungan/support dari atas yang juga sangat krusial. Memang mestinya jalannya tim transparansi ini dibarengi/dibantu oleh Tim Pengarah. Mungkin hal-hal hambatan yang dikemukakan itu akan bisa dihilangkan, dengan keterlibatan tim pengarah. Tapi anggota Tim Pengarah pun masing-masing sangat sibuk, apalagi menjelang Pemilu 2014 ini, kita upayakan yang dari sekretartariat ini lebih berhasil. Sementara ini tenaga sekaretariat terbatas, yang kerja keras seperti Bu Ambar. Tanpa leader sekretariat pun dia/mereka bekerja secara tim work, dengan kompensasi uyang tidak memadai. Disamping itu, dilingkungan pegawai negeri untuk pencairan dana prosedurnya harus didukung lengkap dengan segala dokumen lebih lagi dengan situasi seperti sekarang ini. Seperti untuk pembiayaan perjalanan dinas, semua bukti dan dokumen harus dikumpulkan dan dilampirkan untuk pencairan dana memakan waktu. Disamping itu terjadi pula perubahan prosedur aliran pencairan dananya. Jadi memang banyak hal-hal penghambat yang nanti harus bisa kita atasi. Termasuk prosedur untuk MDTF sendiri memakan waktu hamper 6 bulan. Tidak mudah memutuskan apakah APBN saja atau MDTF saja, kita ikuti saja proses itu, karena kalau bergerak dulu tanpa kejelasan dana, nanti akan susah. Jadi nanti itu akan kita evaluasi untuk bisa diatasi untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Tapi memang pengalaman di negara-negara lain juga pada kali/laporan yang pertama tidak langsung compliant kecuali negara Timor Timur yang cuma 1 perusahaan. Jangan sampai juga ada tanggapan dari negara lain, jika Indonesia diluluskan compliant pada laporan pertama, sementara pada negara lain tidak. Semua alasan materialitas, kompleksitas lingkungan dan perusahaan yang beda dengan negarta lain dan sebagainya sudah kita sampaikan ke Dewan EITI termasuk perpanjangan waktu yang diakomodir, dan kita sudah bekerja keras, tapi akhirnya laporan pertama itu tetap dinilai tidak compliant. Tapi ke depan kita akan berupaya compliant. Tapi tujuan kita tidak sekedar hanya compliant, tapi transparansi sebagai tujuan utama karena manfaatnya untuk negara kita juga, bahwa rakyat diberi informasi yang benar. Kalau hanya untuk mencapai status compliant, ya buka itu, tapi lebih dari itu, sehingga kita menerapkan good governance. Tentu untuk mencapai good governance perlu pembenahan-pembenahan ketentuan dan kebijakan yang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Namun kita akan terus berkerja sama dengan UKP4 untuk mencapai itu.

Selanjutnya Pemimpin Rapat **Emy Perdanahari** membuka acara Audiensi dengan Ketua Dewan EITI Clare Short. Setelah menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya dan rombongan, Emy Perdanahari mempersilakan Madam Clare Short untuk menyampaikan audiensi.

**Madam Clare Short, Ketua Dewan EITI Internasional (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia)**

1. Mohon maaf kami terlambat, karena ada pertemuan dengan Pak Kuntoro UKP4 untuk menyampaikan masukan kepada Presiden.

2. Saya berdiskusi dengan Pak Kuntoro yang meminta secara lugas dan blak-blakan mengenai status EITI Indonesia. Saya katakan kepadanya adalah salah, jika permasalahan bahwa prosesnya sekarang berjalan sangat lambat. Persoalan besarnya adalah Indonesia sekarang diminta tugas untuk melanjutkan hingga bulan Juni. Tapi kalau sampai ini tidak dikabulakan atau tidak berhasil maka ini akan jadi suatu bencana, karena artinya Indonesia gagal.

3. Kami sangat prihatin, dan mengatakan bahwa akan sangat memalukan kalau ini sampai terjadi, karena Indonesia saat ini berada dalam perjuangan open government club nation, itu memang harus bulan Juni, dan harus tepat waktu tidak boleh lagi, kemarin saya juga menyampaikan kepadanya beberapa persoalan misalnya yang terkait dengan perusahaan-perusahaan migas, boleh saya menyampaikan beberapa hal kepadanya dan dia mengatakan bahwa ia akan sampaikan kepada Presiden dan ke beberapa pihak lain.

4. Oleh karena itu pesan saya untuk anda adalah anda harus menyampaikan laporan ini tepat waktu, dan kemudian baru setelah itu akan ada standar baru, dan itu terserah dari anda sendiri bagaimana menggunakannya utuk proses informasi selanjutnya, tapi yan g paling penting adalah agar laporan tersebut tepat waktu agar masih tetap berada di dalam EITI.

**Tanya-Jawab dilakukan**

**Sujoko, SKK Migas**

Sebetulnya, apakah ada yang lebih substansial, selain masalah keterlambatan waktu pelaporan?

**Clare Short, Ketua Dewn EITI Internasional**

Saya ingin mengatakan beberapa hal dan ingin menambahkan, bagi saya, yang paling penting, agar laporan tersebut disampaikan tepat pada waktunya, itu adalah prioritas. Tentu saja selain itu ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, namun kalau kita juga mau berperpartisapasi untuk memperbaiki hal-hal, itu bisa jadi laporan ini tidak akan masuk pada bulan Juni. Jadi buat saya yang paling penting laporan itu disampaikan dulu, sehingga Indonesia tetap menjadi bagian EITI, barulah setelah itu kita memperbaiki hal-hal lain yang bisa diperbaiki, buat saya yang paling penting adalah laporan tersebut disampaikan pada waktunya sehingga Indonesia masih tetap menjadi bagian dari EITI.

Ada suatu pepatah dalam bahasa Inggris yang artinya adalah yang terbaik itu kadang-kadang menjadi musuh dari apa yang baik, jadi kalau kita berusaha terlalu keras untuk menjadi sempurna kadang-kadang yang baik pun tidak akan akan tercapai, jadi lebih baik kalau kita melangkah sedikit demi sedikit tapi kemudian nanti akan juga lebih baik lagi.

**Yulianto, Ditjen Migas**

Pertama, terkait dengan kompleksitas, jadi ini lebih dari 100 perusahaan migas dan lebih dari 10.000 perusahaan minral dan batubara dengan kontraktor dan jenis kontrak masing-masing yang tersebar hampir di semua pulau di Indonesia. Dari sisi geografis ini saja kompleksitas pengumpulan data dan administrasi dan segala macamnya menjadi suatu kendala bagi proses pelaporan EITI kita. Kedua, proses pendanaannya, terkait persetujuan dari Bank Dunia, apakah salah proses yang kita lewati terkait persetujuan Bank Dunia tersebut?

**Dewan EITI Internasional**

Saya kembali ke persoalan validasi. Kita semua tahu apa yansudah dikatakan, dan saya ingin mengulanginya lagi, yang pertama adalah ketepatan waktu, kita sudah sampai di tahun 2013, dan data di tahun 2009 itu adalah data yang sudah terlalu kadaluarsa.

Padahal kalau soal komprehensif, melalkukan komprehensivitas laporan tersebut kita sudah tahu, salah satu prioritasnya adalah scope atau cakupan yang akan dicapai.Pada yang saya ketahui, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan proses penentuan cakupan laporan secara internal dan apakah proses tersebut sudah cukup baik untuk membuat laporan ini juga cukup baik itu saya tidak ketahui, namun diperlukan adanya nasehat masukan dari luar.

Jumlah perusahaan yang ada di Indonesia sebenarnya bukan jumlah perusahaan yang tidak luar biasa. Ada juga negara-negara lain dengan jumlah perusahaannya pun sebanding dengan Indonesia. Kemudaian persoalan mengenai investor. Asalkan MSG sudah menyepakati jumlahnya maka Board / Dewan tidak ikut serta.

**Clare Short, Ketua Dewn EITI Internasional**

Untuk menekankan mengenai apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kami menyadari bahwa Indonesia adalah suatu negeri yang besar dan menuju kerumitan. Sekali kita tahu mengenai persoalan perizinan dimana perizinan itu diberikan dibuatkan di pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah juga menambah lagi tingkat kerumitan yang dihadapi pemerintah Indonesia.

Beberapa contoh negara yang sebenarnya juga memiliki masalah yang kurang lebih sama, contohnya Nigeria, negara yang besar juga memiliki masalah yang besar. Kemudian Kongo juga

Negara yang besar dengan masalah yang berbeda-beda dalam satu negara, juga ada Peru juga memiliki masalah dengan desentralisasi karena begitu banyaknya pertambangan yang ada di sana, kalau kita bisa menentukan seperti cut off, dimana proses pengumpulah data kemudian akan menjadi bisa dilaksanakan secara teknis, Board juga akan menghormati keputusan tersebut. Ini adalah keputusan kita, asalkan kita terus melangkah maju membuat kemajuan, Board akan simpati kepada kita.

Kedua berkaitan dengan penundaan pendanaan, saya juga sudah berbicara dengan Direktur baru Bank Dunia (Kief). Saya sudah mengatakan beberapa masalah ini juga. Sepanjang yang saya ketahui perubahan ini terjadi karena prosedur pada/di negara anda juga, yang normal juga rumit. Tapi karena hal itu datang dari Bank Dunia, maka katakan kepada tentang perubahan itu, dan kami bantu untuk juga mengatakan kepada Bank Dunia, dalam hal ini untuk mempercepat prosesnya. Tapi menurut saya kalau saja apa yang dilakukan sebenarnya kita bisa mempercepat proses sehingga lebih cepat dari apa yang kita inginkan sekarang.

**Ronald Tambunan**

Surat permohonan perpanjangan waktu memang akan kita kirimkan, tapi Dewan sudah datang, dan kita sudah sampaikan reason/pertimbangan pepanjangan waktu itu kepada Bu Clare. Nanti kita kirimkan suratnya. Dan apakah surat itu juga kita sampaikan juga kepada Bu Clare, Karena Bu Clare sudah kita sampaikan segala masalah dan reasonnya.? Jadi sebenarnya surat itu sifatnya hanya formalitas, sedangkan substansinya sudah disampaikan sejak sekarang ini.

**Clare Short, Ketua Dewn EITI Internasional**

Saya kira, saya memahami sebenarnya alasannya, tapi masalahnya walaupun disampaikan sekarang, saya tidak akan bisa membuat keputusan untuk mengabulkan saat ini juga. Dan saya memang harus akan menyakinkan anggota Board yang lain untuk mengabulkannya. Tapi saya kira juga Pak Ronal juga sudah berbicara begitu sekilas mengenai proses permohonan untuk disampaikan, saya kira bawa/masukkan saja, mohonkan untuk dimintakan kemudahan, dan lakukan secara benar, dan kalau dilakukan secara benar, saya yakin itu akan dikabulkan, Kirimkan dan kita bekerja dengan asumsi bahwa itu akan dikabulkan. Jadi harus memasukkannya sesuai dangan table. Kita mengerti masalahnya apa, 2010-2011, 2012 sekarang sudah 2013, lakukan saja dengan asumsi itu sudah dilakukan secara benar dan yakin akan dikabulkan.

**Anggota Dewan EITI**

Saya hanya sekedar ingin mengingatkan ketentuan didalam standar butir 1.6.d, dimana untuk MSG harus menggambarkan adanya keadaan luar biasa sehingga permohonan penundaan itu disampaikan, keadaan luarf biasa macam apa yang sedang dihadapi.

Untuk menentukan apa yang dikatakan Clare, sebenarnya Board ingin meyakinkan bahwa memang sudah ada kemajuan yang berarti yang sudah berjalan, jadi sudah ada laporan yang disampaikan tahun lalu , tapi Board ingin terus dan semua pihak ingin tahu bahwa segala sesuatu yang berjalan setelah itu pun ada suatu kemajuan yang berarti, ada kemajuan yang berarti setelah proses tersebut.

**Clare Short, Ketua Dewn EITI Internasional**

Apa yang sudah dibicarakan, mengenai bagaimana melakukan, menyampaikan permohonan ini, lakukan saja, dan kalau ini sudah disepakati dan jangan lihat hasilnya atau caranya seperti seperti apa, maka hasil akhirnya akan yang paling baik lah

**Anggota Dewan EITI**

Seperti negara lain untuk penundaan, Saya kira, unsur yang pertama bahwa harus ada keadaan luar biasa merupakan suatu tidak diduga. Jadi sebenarnya buat progress ini di luar dari kita. Persoalan pengadaan ini menjadi sesuatu yang di luar dari apa yang kita laksanakan dan kemudian dijadikan antisipasi.

**Clare Short**

Persoalan pengadaan ada penanganan yang lambat telah dan sudah diajukan oleh beberapa negara lain untuk meminta penundaan, dan Clare berusaha menambahkan bahwa negara lain telah mengajukan alasan seperti pergantian pemerintahan, atau pergantian anggota Tim. Tapi, kata Clare, surat tersebut memang sudah hampir selesai, sebetulnya masalahnya itu buka disitu, jadi sampaikan saja kemudian sibukkan diri kita dengan pekerjaan yangharus kita lakukan.

**Yulianto (Ditjen Migas)**

Dengan berbagai alasan materialitas dan keterlabatan Laporan Pertama tidak compliant, Tapi jika laporan kedua gagal lagi kira-kira kerugiannya apa bagi Indonesia, atau malah untung?

**Clare Short**

Bagi saya kemungkinannya kecil bahwa perpanjangan ini tidak akan dikabulkan, sebetulnya yang lebih besar terletak pada apakah kita kemudian akan berarti kita akan melaporkan apa yang perlu dilaporkan dan perlu melaporkan pada bulan Juni. Nah, apa kerugiannya jika Indonesia hilang keanggotaannya dari EITI. Ini akan mempermalukan pemerintah terutama pada government partnership, untuk kita memimpin dalam upaya mempromosikan dan menggelorakan keterbukaan transparansi kita Indonesia menjadi suatu bagian dari organisasi internasional itu. Kita gagal di situ. Ini adalah suatu hal yang disayangkan. Kedua, bagi kami di EITI, karena Indonesia adalah menjadi pemimpin dalam kawasan ini, setelah Indonesia bergabung, Vietnam kemudian menimbang-nimbang ikut bergabung. Myanmar dengan pemerintahan barunya dan juga Filipina juga ingin bergabung. mengikuti Indonesia. Nah bagaimana mereka mengikuti sebuah negara pemimpinnya, tersandung kemudian jatuh. EITI tidak sekedar transparansi demi transparansi itu sendiri, karena transparansi adalah upaya untuk mendorong agar korupsi berhenti, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti minyak, gas, dan batu bara semuanya digunakan demi sebaik-baiknya kepentingan rakyat, dengan adanya transparansi dan fakta internasional bahwa ini suatu gerakan international suatu negara bisa belajar dari negara yang lain, akhirnya kita bisa lebih baik lagi, mengolah dan akhirnya kehidupan orang/rakyat diaharapkan menjadi lebih baik lagi.

**Maryati (PWYP Indonesia)**

Saya sebagai koordinator organisasi masyarakat sipil di Indonesia, ketika kita melani EITI sejak awal Indonesia bertekad untuk menjadi anggota pelaksana EITI, dan presiden telah mengeluarkan peaturan presiden. Kalau sebagai negara dan pemerintah sendiri kita masih tidak komit dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintgah kita sendiri, maka kita sebagai negara apa? Mungkin itu menjadi konsen bagi kita semua.

Yang Kedua, setiap problem industri ekstraktif di Indonesia terkait kemudian dengan transparansi, suatu persoalan yan g sangat serius di SKK Migas terkaitdengan korupsi. Jadi, apa yan g dilakukan oleh kepala SKK Migas, berarti sebuah refleksi bagi kita bahwa di SKK Migas ada masalah industri ekstraktif di Indonesia. Ada masalah di sektor hulu juga dimana pengamanan ketahanan energi adalah satu yang terkait dengan investment collector. Saya selalu berbicara dengan private sector, mereka selalu mengeluh bahwa peraturan selalu berganti-ganti, bahwa kebijakan tidak bisa dipegang dari satu kementerian ke kementerian yang lain, perusahaan swasta susah untuk mengembangkan bisnisnya dan sebagainya. Itu juga menjadi problem kita bersama, sebagai masyarakat dan sebagai warga negara saya kuasa bahwa kita harus bersatu dalam kondisi seperti itu. Menurut aturan memang bukan hanya untuk good governance itu sendiri, transparansi bukan hanya untuk transparansi itu sendiri, tapi saya yakin BPK, Polisi dan pemberantasan korupsi dan lembaga-lembaga dan orang-orang yang benar-benar menginginkan reformasi dan perbaikan di negeri ini termasuk kita yang ada di ruangan ini akan menggunakan data-data EITI kalau dia up to date, kalau dia substansial dan sebagainya. Jadi persoalan compliant atau tidak compliant menurut saya, harus lebih dulu sudah mencapai laporan tepat waktu, tadi bagaimana dia time series, bisa dipakai oleh publik bisa dibaca cukup realiable begitu, kalau kita lihat sendiri, kemarin kita sudah sadar bahwa tahun-tahun sebelumnya dari data-data pajak dilapokan dengan agregat sendiri tidak cukup realiable, dianggap tidak cukup realiable dan setelah dikonfimasi melalui LKPT, pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, ternyata memang datanya tidak realiable. Jadi kita semua perlu sadar, bahwa kondisi bahwa kita semua menginginkan Indonesia lebih baik, karena kita semua kita tahu bahwa kemiskinan, dan bahwa pendidikan, bahwa kesahatan yang tidak bagus di negeri disebabkan karena korupsi. Jadi kita kembali ke peraturan, bagaimana peraturan prersiden, komitmen Indondesia, bahwkan kita menjadi ketua open government partnership, Indonesia cukup dipandang dalam posisi ASEAN, kita 2015 akan mencapai satu community ekonomi di ASEAN yaitu AEC . Saya kira khusus Indonesia tidak bisa terilusi hanya karena persoalan-persoalan, dalam tanda kutip pada forum internsaional kita tidak menjadi contoh atau menjadi lokomotif bagi kawasan regional ini. Menurut saya sebagai masyarakat, ada EITI atau tidak ada EITI, Bapak-bapak di sini serius atau tidak serius, kami tetap akan mendorong tentang transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif.

**Clare Short**

Itulah salah satu suara perempuan Indonesia yang kemudian berapi-api

Beberapa kata penutup dari Clare Short:

Terima kasih senang bertemu dengan anda dan juga senang bertemu dengan banyak pihak yang lain di Indonesia. Saya harap tolonglah upayakan agar ini berhasil, membuat laporan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, kita semua tahu apa yang harus dilakukan dan asalkan kita gigih, asalkan kita punya tekad maka sementara bisa seperti itu. Setelah itu maka Indonesia akan melakukan status patuh EITI. Kemudian barulah kita menyerahlan standar yang baru dan kemudian kita akan bisa menggunakan standar baru itu untuk mendorong reformasi-reformnasi yang akan kita lakukan dinegeri ini. Pada saat yang sama kemudian kita akan berada pada detik-detik saat Pemilu, akan ada suatu pemerintahan yang baru, dan kemudian akan masuk satu tahap yang baru phase yang baru sejarah Indonesia. Jadi kita bisa melakukan banyak hal untuk menolong begitu banyak orang dan bahkan atau ada banyak orang yang ingin hidup mulia, dan ini adalah salah satu cara kita bisa melakukannya. Upayakan pada bulan Juni setelah itu kita bisa melakukan begitu banyak hal yang lain yang kita bisa ambisius untuk melakukan. Tapi dan setelah itu kita akan bisa menyadari menolong begitu banyak orang dan bahkan mungkin kita tidak akan pernah menemui.

**Penutup**

**Emy Perdanahari, pemimpin rapat ,** menyampaikan terima kasih untuk acara rapat dan audiensi ini, terutama atas kedatangan Calre Short dan staf dari Dewan EITI Internasional. Kita anggap sebagai seorang ibu yang menginginkan anaknya melakukan perbaikan-perbaikan. Itu kita tahu semua untuk kebaikan kita bangsa Indonesia. Memang sudah harus diperbaiki dari awal, karena sudah 65 tahun merdeka, tapi rakyatnya masih, maksudnya ke belakang belum adanya transparansi, ke depan kita akan transparansi, maksudnya kita ingin melihat anak cucu kita ke depan lebih baik, dan sumber daya alam kita akan terus bisa sustainable ke depan dan tidak habis dalam waktu singkat, karena resource nya itu lah yang harus dijaga. Justeru orang dari luar yang mengingatkan perbaikan kita ke depan.

Akhirnya Ibu Emi menutup rapat dan audiesi pada pukul 13:30 WIB.

Rapat dan Audiensi selesai.

../malidu.













 